

KAJIAN FILSAFAT ILMU DAN FILSAFAT PENDIDIKAN TENTANG RELATIVISME KULTURAL DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT MORAL

Satrijo Budiwibowo *

Abstract

Pedagogics as the mainstream in edication, requires practical notions generated from phylosophy so that the contents can fulfil conceptual and functional substances. Phylosophy proposes questions and search for reality and experience which are usually found in educational practice. Phylosophy and education are interrelated, where problems of education and those of phylosophy belong to the same area. The development of conceptual frameworks is spawned by phylosophy. Educational phylosophy bears schools as naturalism, idealism, realism, pragmatism, progressivism, esentialism and perenialism. Morality has become a set of rules of the way people mutually need the others, rationally receive for the sake of mutual benefits in the obedience of the rules. The most crucial problem of social contract is the mutual trust against others,obedience of rules, except in a very specific condition.

Key words: Phylosophy of science, phlosophy of education, cultural retivism, moral phylosophy

Abstrak

Pedagogik sebagai ilmu pokok dalam pendidikan, jiwa dan isinya agar dapat memenuhi persyaratan landasan konsep dan fungsinya, memerlukan landasan yang berasal dari filsafat. Filsafat mengajukan pertanyaan dan menyelidiki realita dan pengalaman yang banyak terdapat dalam pendidikan. Filsafat dan pendidikan mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, karena problema-problema tersebut berada dalam lingkungan dua disiplin ini. Pendidikan dalam pengembangan konsep-konsepnya antara lain menggunakan dasar-dasar dari kedua konsep tersebut yaitu filsafat dan pendidikan. Aliran filsafat pendidikan mencakup naturalisme, idealisme, realisme, pragmatisme, progresivisme, esensialisme, dan perenialisme. Moralitas merupakan seperangkat aturan yang merancang bagaimana hendaknya orang saling memerlakukan satu sama lain, bahwa orang yang rasional akan setuju untuk menerima, demi keuntungan timbal balik, asalkan semua yang lain mengikuti aturan-aturan itu juga. Masalah pokok dari kontrak sosial adalah kalau seseorang atau

* Satrijo Budiwibowo adalah Dosen Prodi Pendidikan Akuntansi dan Ketua LPPM IKIP PGRI Madiun

sekelompok orang itu mampu mempercayai orang lain atau kelompok lain untuk setia pada aturan-aturan, kecuali dalam situasi darurat.

Kata Kunci: Filsafat Ilmu, Filsafat Pendidikan, Relativisme Kultural, Filsafat Moral

A. PENDAHULUAN

Pembahasan tentang konsep pendidikan perlu dikaitkan dengan ilmu pendidikan karena keduanya menyangkut masalah hakikat manusia yang menjelaskan kedudukan peserta didik dan pendidik dalam interaksi pendidikan. Teori pendidikan merupakan pengetahuan tentang apa dan bagaimana seyogyanya pendidikan dilaksanakan. Sedangkan pendidikan praktis merupakan pelaksanaan pendidikan secara konkret.

Keduanya tidak dapat dipisahkan. O'Connor menyatakan bahwa teori pendidikan memiliki syarat-syarat berpikir lurus dan benar (logis), deskriptif, dan menjelaskan (Barnadib, 1996:8-9). Teori pendidikan disusun sebagai latar belakang yang hakiki dan rasional. Teori pendidikan dalam ilmu pendidikan atau pedagogik adalah ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan, secara menyeluruh dan abstrak.

Pedagogik sebagai ilmu pokok dalam lapangan pendidikan sesuai jiwa dan isinya agar dapat memenuhi persyaratan landasan konsep dan fungsinya, sudah barang tentu memerlukan landasan-landasan yang berasal dari filsafat atau setidaknya-tidaknya mempunyai hubungan bila berbagai pemikiran mengenai pendidikan memerlukan ilumiasi dan bantuan penyelesaiannya dari filsafat. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan secara ringkas, yakni bagaimana bentuk relevansi antara filsafat ilmu dan filsafat pendidikan dalam perspektif moral-kultural?

B. PEMBAHASAN

1. Hubungan antara Filsafat dan Ilmu Pendidikan

Berdasarkan uraian pendahuluan diatas maka perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa filsafat pendidikan adalah ilmu pendidikan yang bersendikan filsafat, atau filsafat yang diterapkan dalam usaha pemikiran dan pemecahan mengenai masalah pendidikan. Menurut batasan modern, filsafat diartikan antara lain sebagai ilmu yang berusaha untuk memahami semua hal yang timbul di dalam keseluruhan lingkup pengalaman manusia.

Hubungan antara filsafat dan ilmu pendidikan tidak hanya sekedar bersifat insidental, tetapi merupakan suatu keharusan. Dewey (1946:38) menyatakan bahwa filsafat itu adalah teori umum dari pendidikan, landasan dari semua pemikiran mengenai pendidikan. Lebih dari itu, memang filsafat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menyelidiki faktor-faktor realita dan pengalaman yang banyak terdapat dalam lapangan pendidikan.

Sama halnya dengan pengertian dalam filsafat, maka dalam ilmu pendidikan, sistem yang dapat disusun adalah bersendikan adanya gagasan-gagasan mengenai pendidikan atau prinsip-prinsip yang merupakan keseluruhan dan saling berhubungan. Filsafat sebagai suatu ilmu yang mengadakan tinjauan

dan mempelajari obyeknya dari sudut hakikat, berhadapan dengan problem utama yang meliputi:

- a. Realita, yaitu berupa kenyataan yang menjurus kepada masalah kebenaran. Kebenaran akan timbul apabila orang dapat menarik kesimpulan bahwa pengetahuan yang dimilikinya memang benar-benar ada (nyata);
- b. Pengetahuan, yaitu berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah pengetahuan bagaimana cara memperolehnya. Pengetahuan ini dipelajari dalam epistemologi;
- c. Nilai, yaitu yang dipelajari oleh cabang filsafat yang disebut aksiologi. Pertanyaan-pertanyaan yang dicari jawabannya antara lain seperti nilai-nilai yang dikehendaki oleh manusia yang akan dipakai sebagai dasar hidupnya.

Brubacher (1950:35-40) berpendapat bahwa filsafat dan pendidikan mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, karena problema-problema tersebut berada dalam lingkungan dua disiplin ini. Pendidikan dalam pengembangan konsep-konsepnya antara lain menggunakan dasar-dasar dari kedua konsep tersebut yaitu filsafat dan pendidikan. Dalam menyelenggarakan pendidikan diperlukan pendirian mengenai pandangan dunia yang bagaimanakah yang kita perlukan saat sekarang ini.

Epistemologi dalam pendidikan diperlukan karena berkaitan dengan penyusunan dasar-dasar kurikulum. Kurikulum ini lazimnya diartikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan dapat diibaratkan sebagai jalan raya yang perlu dilewati oleh siswa dalam usahanya untuk memahami dan mengenal ilmu pengetahuan.

Aksiologi sebagai cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dekat pula dengan ilmu pendidikan, karena dunia nilai sebagai dasar bagi pendidikan, oleh karena itu perlu dipertimbangkan dalam penentuan tujuan pendidikan. Disisi lain pendidikan sebagai fenomena kehidupan sosial, kultural, dan keagamaan tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai.

Logika sebagai cabang filsafat yang meletakkan dasar ajaran berpikir diperlukan oleh pendidikan kecerdasan. Pendidikan kecerdasan menghendaki seseorang mampu mengutarakan pendapat dengan benar dan tepat. Untuk itu diperlukan penguasaan logika dengan baik.

2. Masalah Kenyataan Berdasarkan Pandangan Naturalisme, Idealisme, Realisme, dan Pragmatisme

Tinjauan dari masing-masing aliran tersebut sebenarnya menuju pada muara yang sama yaitu berbicara masalah kenyataan. Oleh karena kenyataan merupakan masalah utama, maka pandangan tersebut dianggap dapat memberikan gambaran ciri pokok dari masing-masing aliran tersebut.

Naturalisme mempunyai pandangan bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta fisik ini. Hal ini berarti bahwa yang dimaksud adalah bukan kenyataan spiritual atau supranatural. Oleh karena itu, menurut pandangan naturalis, jiwa itu dapat menurun kedudukannya, menjadi dan mempunyai hakikat sebagai unsur-unsur materi. Dengan demikian naturalisme bisa menjadi materialisme. Filsafat naturalisme adalah filsafat dunia itu sendiri, karena

memandang bahwa segala sesuatu ini berasal dari alam dan tiada sesuatupun yang ada ini terdapat dibalikinya. Atas dasar prinsip ini naturalisme modern cenderung untuk menjadi pluralisme; suatu paham yang berpendirian, bahwa kenyataan itu dapat terdiri dari banyak tipe benda-benda alamiah.

Idealisme mempunyai pendirian bahwa kenyataan itu terdiri atau tersusun atas substansi sebagaimana gagasan-gasan atau spirit. Alam fisik ini tergantung dari jiwa universal atau Tuhan, yang berarti pula alam adalah ekspresi dari jiwa tersebut. Jiwa mempunyai tempat utama dalam susunan alam semesta ini dan arena dunia yang sebenarnya menurut pandangan idealisme ini adalah berbeda dengan apa yang nampak oleh indera dihadapan manusia. Selain daripada itu pandangan aliran ini menganggap bahwa dunia beserta bagian-bagiannya harus dipandang mempunyai hubungan satu sama lain, sehingga secara keseluruhan merupakan suatu sistem. Dunia adalah suatu totalitas, suatu kesatuan yang logis dan bersifat spiritual.

Realisme adalah filsafat yang timbul pada jaman modern dan sering disebut “anak” dari aliran naturalisme. Pandangannya tentang dunia adalah sebagai suatu obyek yang nyata. Realisme memandang pula bahwa kenyataan itu berbeda dengan jiwa yang mengetahui obyek atau dunia luar tersebut. Kenyataan tidak sepenuhnya bergantung dari jiwa yang mengetahui, tetapi merupakan hasil pertemuan dengan obyeknya. Orang dapat memiliki pengetahuan yang dianggap kurang tepat mengenai benda atau sesuatu hal yang sesungguhnya, tetapi sebaliknya dapat memiliki gambaran yang tepat apa yang nampak. Oleh karena itu pengamatan, penelitian, dan penarikan kesimpulan mengenai hasil-hasilnya perlu agar dapat diperoleh gambaran yang tepat secara langsung atau tidak langsung tentang sesuatu.

Pragmatisme berpendapat bahwa kenyataan itu berada pada pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu kemampuan perwujudan nyata adalah hal-hal yang mempunyai kedudukan utama disekitar pengetahuan itu sendiri. Aliran ini memandang realita sebagai suatu proses dalam suatu periode tertentu, ini berarti bahwa orang yang mengetahui mempunyai peranan untuk menciptakan atau mengembangkan hal-hal yang diketahui. Hal ini berarti pula bahwa tindakan yang dilakukan oleh orang yang memiliki pengetahuan dapat menjadi unsur penentu untuk mengembangkan pengetahuan tersebut.

Berdasarkan pandangan dari berbagai aliran tersebut, filsafat berusaha untuk mengadakan penyelidikan mengenai hakikat dari segala sesuatu. Artinya bahwa filsafat berusaha mempelajari makna yang paling utama dari segala sesuatu itu. Filsafat juga untuk selamanya menjadi sarana utama manusia untuk mengatur diri sendiri, berusaha menyesuaikan, dan mengikuti perkembangan jaman sesuai tuntutan keadaan. Oleh karena itu manusia dapat mengenal dirinya sendiri.

3. Pandangan Progresivisme, Esensialisme, dan Perennialisme

a. Progresivisme

Progresivisme mempunyai konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut

progresivisme menolak adanya pendidikan yang bersifat otoriter. Alasan penolakannya didasarkan bahwa pendidikan yang bersifat otoriter dapat diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan pendidikan, karena dianggap kurang menghargai dan memberikan tempat semestinya kepada siswa dalam proses pendidikannya.

Inti perhatian dari progresivisme adalah mendorong kemajuan atau *progress* dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu beberapa ilmu pengetahuan yang mampu menumbuhkan kemajuan dipandang progresivisme merupakan bagian utama dari suatu budaya. Disamping kemajuan atau *progress* yang menjadi inti perhatian, progresivisme juga memperhatikan lingkungan dan pengalaman. Berkaitan dengan inti utama perhatian progresivisme, ide-ide, teori-teori, atau cita-cita tidak hanya cukup diakui sebagai hal-hal yang ada, tetapi yang ada itu harus dicari artinya bagi suatu kemajuan demi kebaikan.

Pandangan progresivisme tentang realita, seperti yang dinyatakan oleh Dewey (1946) bahwa sifat utama mengenai realita, sebenarnya dapat dikatakan dengan tepat bahwa tiada teori realita yang umum. Diantara kaum pragmatis jadi progresivis, Dewey mempunyai pandangan yang ekstrim, sebab tokoh-tokoh lain seperti John Santayana, John Childs tidaklah demikian. Mereka mengatakan bahwa metafisika itu ada, karena pragmatisme mempunyai berbagai konsep tentang eksistensi. Berdasarkan pandangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ontologi progresivisme mengandung pengertian dan kualitas evolusionistis yang kuat. Untuk itu pengalaman diartikan sebagai ciri dari dinamika hidup, dan hidup adalah perjuangan, tindakan, dan perbuatan. Dengan demikian pengalaman adalah juga merupakan perjuangan.

b. Esensialisme

Esensialisme mempunyai tinjauan mengenai kultur dan pendidikan yang berbeda dengan progresivisme. Progresivisme memandang bahwa sesuatu hal itu mempunyai sifat yang serba fleksibel dan bahwa nilai-nilai itu pada hakikatnya berubah dan berkembang. Esensialisme menganggap bahwa dasar berpijak semacam itu dianggap kurang tepat. Fleksibilitas dalam pendidikan, segala bentuk dapat menjadi sumber timbulnya pandangan yang berubah-ubah, pelaksanaan yang kurang stabil, dan tidak menentu. Sehubungan dengan hal itu pendidikan harus bersandikan atas nilai-nilai yang dapat mendatangkan kestabilan. Oleh karena itu untuk memenuhi maksud tersebut nilai-nilai itu perlu dipilih, yaitu nilai-nilai yang mempunyai tata yang jelas dan yang telah teruji oleh waktu. Nilai-nilai yang dapat memenuhi adalah yang berasal dari kebudayaan dan filsafat yang korelatif.

Idealisme dan realisme adalah aliran filsafat yang membentuk corak esensialisme. Sumbangan yang diberikan oleh masing-masing ini bersifat eklektik. Artinya dua aliran filsafat ini bertemu sebagai pendukung esensialisme, tetapi tidak lebur menjadi satu, sehingga tidak melepaskan sifat utama masing-masing.

c. Perenialisme

Perenialisme memandang bahwa keadaan sekarang adalah merupakan jaman yang mempunyai kebudayaan yang kacau, terganggu, penuh kebingungan

dan kesimpangsiuran. Oleh karena itu dinilai sebagai jaman yang membutuhkan usaha untuk mengamankan lapangan moral, intelektual, dan lingkungan sosial kultural yang lain. Perennialisme beranggapan bahwa mencari dan menemukan tempat yang tepat merupakan tugas yang utama dan pertama dari sebuah filsafat dan filsafat pendidikan.

Perennialisme menempuh jalan regresif, karena pandangannya yang menganggap bahwa tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada prinsip umum yang telah menjadi dasar tingkah laku dan perbuatan jaman masa lalu. Yang dimaksud dengan hal ini adalah kepercayaan-kepercayaan aksiomatis mengenai pengetahuan, realita, dan nilai dari suatu jaman. Semuanya itu dianggap sebagai dasar sivilisasi dari abad ke abad.

Motif perennialisme dengan mengambil jalan regresif bukan hanya bersifat nostalgia atau rindu akan nilai-nilai lama untuk diingat atau disanjung, melainkan berpendapat bahwa nilai-nilai tersebut mempunyai kedudukan vital bagi pembangunan kebudayaan. Prinsip-prinsip aksiomatis yang tidak terikat oleh waktu itu terkandung dalam semua sejarah.

Perennialisme merupakan filsafat yang susunan bangunan ilmunya merupakan satu kesatuan. Oleh karena itu premis-premis yang disusun merupakan hasil pikiran yang memberi kemungkinan bagi seseorang untuk bersikap tegas dan jujur. Dengan demikian perennialisme ini tidak sepaham dengan prinsip-prinsip yang evolusionistis dan naturalistis.

4. Teori Moral Kontrak Sosial

Moralitas merupakan seperangkat aturan yang merancang bagaimana hendaknya orang saling memperlakukan satu sama lain, bahwa orang yang rasional akan setuju untuk menerima, demi keuntungan timbal balik, asalkan semua yang lain mengikuti aturan-aturan itu juga (Rachel, 2004:266). Jika diperhatikan, maka teori tersebut dalam banyak hal terletak pada fakta bahwa teori itu menyediakan jawaban-jawaban sederhana dan masuk akal untuk persoalan-persoalan rumit yang senantiasa membingungkan para filsuf. Teori moral kontrak sosial gagasan kuncinya adalah bahwa aturan-aturan yang mengikat secara moral hanyalah aturan-aturan yang diperlukan untuk kehidupan sosial.

Masalah pokok dari kontrak sosial adalah kalau seseorang atau sekelompok orang itu mampu mempercayai orang lain atau kelompok lain untuk setia pada aturan-aturan, kecuali mungkin dalam situasi darurat. Hanya dengan demikian kita merasa aman, oleh karena itu kesediaan kita sendiri yang mantap merupakan harga yang kita bayar untuk menjamin kesediaan yang teguh dari orang lain. Para filsuf merasa tidak aman dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab tentang moral, lebih-lebih menyangkut pengorbanan diri demi sebuah nilai sosial tentang moral. Secara instingtif para filsuf merasa bahwa bagaimanapun juga tuntutan moral itu ada batasnya. Oleh karena itu secara tradisional mereka menyatakan bahwa tindakan heroik untuk memperoleh pengakuan moral dengan mengorbankan kepentingan sosial lain yang sebenarnya dihindari adalah merupakan tindakan heroik dan bersifat supererogatoris, artinya tindakan yang dilakukan berada diatas tuntutan dari sekedar sebuah kewajiban.

Karena itu muncul pertanyaan baru, apakah ada “fakta” moral? Apakah putusan-putusan moral secara obyektif benar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut ternyata para filsuf telah lama mempersoalkan apakah pendapat-pendapat moral moral kita itu mencerminkan sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan subyektif atau kebiasaan-kebiasaan dari suatu masyarakat. Mereka merasa bahwa pasti ada *sesuatu* yang lebih pada moralitas, daripada sekadar kebiasaan atau perasaan, tetapi sangat sulit untuk mengungkap *sesuatu* itu.

Moralitas bukan sekadar masalah kebiasaan atau perasaan. Memang moralitas ada dasarnya. Namun teori ini tidak perlu mengajukan sejenis fakta yang khusus untuk menjelaskan dasar itu. Moralitas adalah seperangkat aturan yang disetujui untuk diterima oleh orang-orang yang rasional, demi kebaikan mereka secara timbal balik. Kita dapat menetapkan manakah aturan-aturan yang baik bagi kita dengan meneliti secara rasional. Disamping itu untuk menetapkan apakah suatu tindakan khusus dapat diterima secara moral, kita dapat melihat apakah sesuai dengan aturan-aturan itu. Apabila hal ini menjadi jelas, kebingungan yang menyangkut “obyektivitas” dengan sendirinya akan hilang.

5. Relativisme Kultural

Moralitas berbeda-beda dalam setiap masyarakat dan merupakan kesepahaman yang sesuai untuk kebiasaan-kebiasaan yang disetujui bersama (Benedict, 1934). Menyimak dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap kebudayaan yang berbeda mempunyai kode moral yang berbeda pula. Apa yang dianggap benar oleh suatu kelompok mungkin justru sebaliknya dianggap tidak benar oleh kelompok lain. Artinya dalam satu rezim tertentu moral budaya yang berlaku pada waktu itu dianggap esensial namun ketika rezim telah berubah, maka budaya yang telah berlaku dianggap sudah tidak sesuai lagi karena jaman telah berubah. Namun ketika pada rezim yang baru itu memberlakukan budaya yang baru, ternyata dianggap tidak berhasil, maka orang akan kembali merindukan nilai-nilai budaya masa lalu yang dianggap masih kuat sebagaimana pandangan perenialisme.

Bagi kaum pemikir, pendapat Benedict yang menyatakan bahwa “kebudayaan yang berbeda mempunyai kode moral yang berbeda” tampaknya menjadi kunci untuk memahami moralitas. Gagasan mengenai kebenaran universal dalam etika, hanyalah sebagai mitos. Adat istiadat dari berbagai masyarakat yang berbeda itulah yang merupakan kenyataan yang ada. Adat istiadat semacam itu tidak bisa dikatakan “benar” atau “salah”, karena hal itu mengimplikasikan seolah kita mempunyai standar kebenaran atau kesalahan yang tidak tergantung dengan standar ini, adat istiadat yang lain dapat dinilai. Standar baku tidak ada. Setiap standar selalu terikat pada kebudayaan tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli sosiologi Sumner (1960) yang menyatakan jalan yang “benar” adalah jalan yang ditempuh oleh para pendahulu dan yang telah diturunkan. Tradisi itu menjadi pembenaran dirinya sendiri. Tradisi tak bisa diuji untuk pembenaran atas dasar pengalaman.

Kebenaran harus dipahami menurut tata cara masyarakat yang bersangkutan, tidak menurut asal usul yang lepas, dari luar mereka, dan dibawa masuk untuk menguji tradisi. Menurut tata cara masyarakat, apapun yang ada,

adalah benar. Mengapa demikian? Karena tata cara itu bersifat tradisional dan karenanya memuat dalam dirinya wewenang dari roh-roh nenek moyang. Jikalau kita sampai pada tata cara masyarakat setempat, maka kita berada pada akhir dari analisis kita.

Jika kita perhatikan, pendapat Sumner diatas, tampak bahwa alur pemikirannya akan dapat membawa banyak orang untuk menjadi skeptis mengenai etika. Disisi lain relativisme kultural, menantang keyakinan kita sehari-hari mengenai obyektivitas dan universalitas dari kebenaran moral. Dengan demikian pemikiran di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada sesuatu yang disebut kebenaran universal dalam etika, tetapi hanya ada kode-kode budaya yang beraneka ragam. Sehubungan adanya perbedaan tersebut, perlu dipisahkan unsur-unsur yang beragam dari sebuah teori, karena menurut analisis, beberapa bagian dari teori itu bisa jadi benar, sementara yang lain tampaknya keliru.

6. Argumentasi Perbedaan Kultural

Relativisme kultural adalah teori tentang hakikat moralitas. Pada kesan pertama, tampaknya masuk akal (Rachel, 2004:47). Lebih lanjut Rachel menyatakan, dan jikalau kita analisis relativisme kultural, kita dapatkan bahwa ternyata tidak begitu rasional sebagaimana tampaknya pada penampilan pertama. Bila kita perhatikan, maka pada dasar relativisme kultural, ternyata terdapat sesuatu bentuk argumentasi. Strategi yang digunakan oleh kaum relativisme kultural adalah berargumentasi dari fakta mengenai adanya perbedaan pandangan kultural menuju pada suatu kesimpulan mengenai status moralitas. Dengan demikian argumentasi-argumentasi ini merupakan variasi dari suatu gagasan dasar.

Pada kasus-kasus khusus dari satu argumentasi yang lebih umum menyatakan bahwa: (1) kebudayaan yang berbeda mempunyai kode-kode moral yang berbeda; dan (2) oleh karena itu, tidak ada “kebenaran” obyektif dalam moralitas. Benar atau salah hanyalah soal pandangan dan pandangan-pandangan itu bervariasi dari satu budaya ke budaya lain. Argumentasi-argumentasi tersebut dapat kita sebut sebagai argumen perbedaan kultural. Bagi orang kebanyakan, argumentasi ini tampaknya benar, tetapi dari sudut pandang logika ternyata tidak dapat dibenarkan.

Sebagai suatu contoh, orang Yunani percaya bahwa makan jenazah merupakan tindakan yang keliru. Sementara orang Callatia percaya sebaliknya hal itu benar. Apakah hal ini bisa diterima? Dari faktanya saja mereka sudah berbeda pandangan, lantas apakah tidak ada kebenaran obyektif dalam hal tersebut? Tentu saja tidak. Karena bisa jadi bahwa praktik itu secara obyektif benar (atau salah) dan bahwa yang satu atau yang lain dari kedua itu memang keliru.

Kekeliruan yang mendasar dalam argumentasi perbedaan kultural adalah bahwa argumentasi itu mencoba menarik kesimpulan substantif mengenai suatu pokok moralitas dari sekedar fakta, bahwa orang tidak mempunyai pandangan yang sama tentang hal itu. Persoalannya hanya menyangkut logika, jangan sampai disalahpahami. Oleh karena itu kita jangan mengatakan bahwa kesimpulan dari argumentasi itu keliru, sebelum ada alasan-alasan yang kuat, bukan atas dasar “pengandaian”. Secara logis hanya dapat dikatakan bahwa kesimpulan itu tidak muncul dari pengandaian awal. Hal ini penting karena untuk menetapkan apakah

kesimpulan itu benar, kita perlu argumentasi untuk mendukungnya. Relativisme kultural mengajukan argumentasi ini, namun sayangnya argumentasi ini keliru, sehingga tidak dapat membuktikan apa-apa.

Hakikat relativisme kultural menurut Sumner adalah bahwa tidak ada ukuran benar atau salah kecuali standar dari masyarakat itu sendiri (Rachel, 2004:52). Kebenaran harus dipahami menurut tata cara masyarakat yang bersangkutan sendiri, tidak menurut asal usul yang lepas dari luar mereka, dan dibawa masuk untuk menguji tradisi. Menurut tata cara masyarakat, apapun yang ada, adalah benar. Implikasi dari relativisme kultural seringkali membingungkan, karena tidak semua orang dapat berpikir bahwa kode etik masyarakat kita itu sudah sempurna, sementara masyarakat lain berpikir tentang cara-cara bagaimana memajukan komunitasnya. Akan tetapi relativisme kultural tidak melarang masyarakat untuk mengkritik peraturan-peraturan masyarakat lain, justru sebaliknya menganjurkan mengkritik peraturan-peraturan dari komunitas masyarakat kita sendiri.

Seorang pembaharu seperti Martin Luther King, berusaha mengubah masyarakatnya ke arah yang lebih baik. Dalam batasan-batasan yang ditanamkan oleh relativisme kultural, hanya ada satu cara untuk melakukan tindakan. Jikalau suatu masyarakat tidak hidup sesuai dengan cita-citanya sendiri, seorang pembaharu mungkin dipandang telah melakukan tindakan yang terbaik, sebab cita-cita masyarakat merupakan standar yang didalamnya terkandung nilai-nilai kehidupan yang sangat berharga. Tetapi seorang pembaharu tidak bisa melawan cita-cita itu sendiri, karena cita-cita itu menurut definisinya sudah benar. Oleh karena itu menurut relativisme kultural, cita-cita pembaharuan sosial hanya mempunyai arti bila berada dalam batas-batas tertentu.

Semangat asli dari relativisme kultural muncul dari pengamatan, bahwa kebudayaan-kebudayaan berbeda secara mencolok dalam pandangan mereka menyangkut apa yang benar dan apa yang salah. Ada teori umum yang pokok, yaitu ada aturan-aturan moral tertentu yang dianut secara bersama-sama oleh semua masyarakat, karena aturan-aturan itu penting untuk kelestarian masyarakat. Jika kita belajar secara cermat tentang relativitas kultural, maka kita akan menemukan adanya suatu yang kurang tepat. Kekurangtepatan itu terletak pada argumennya yang kurang sah, karena mempunyai konsekuensi yang tidak masuk akal dan bahwa perbedaan-perbedaan kultural yang ada sesungguhnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan implikasi yang ditimbulkannya. Meskipun demikian gagasan relativisme kultural tetaplah menarik karena memang ada dasarnya.

C. KESIMPULAN

Ada dua pelajaran yang bisa ditarik sebagai kesimpulan dari pembahasan relativitas kultural ini. **Pertama**, relativisme kultural mengingatkan kita, secara benar, mengenai bahaya pengandaian/perumpamaan yang seolah-olah semua pilihan yang kita ambil berdasarkan pada suatu standar rasional yang mutlak. Pada hal tidak semua yang kita lakukan hanya cocok untuk masyarakat kita saja, sehingga seringkali tidak berpijak pada fakta yang sebenarnya. Karena itu teori ini berguna bagi kita, sekadar untuk mengingatkan diri kita sendiri. Relativisme kultural mulai dengan pandangannya yang patut dihargai, yaitu bahwa banyak

praktik yang dilakukan oleh masyarakat hanya bersifat kultural saja. Hal ini menjadi salah, ketika orang menyimpulkan bahwa karena praktik-praktik tertentu seperti itu, maka *semua* harus begitu.

Kedua, relativisme kultural ini ada kaitannya dengan keterbukaan pikiran. Dalam pertumbuhan seseorang dapat menerima berbagai perasaan yang kuat. Kita bisa belajar berpikir mengenai sejumlah tipe tindakan yang bisa diterima, sementara yang lain kita pelajari sebagai yang tidak bisa kita terima. Relativisme kultural menyediakan perangkat untuk dogmatisme, yang terbentuk oleh pandangan-pandangan moral yang merupakan cerminan dari kecurigaan masyarakat. Kita mungkin dapat memahami bahwa perasaan kita tidak selalu merupakan persepsi kebenaran, persepsi kita mungkin tidak lebih dari sekadar hasil pengondisian kultural saja.

Dengan demikian, kalau kita mengetahui pandangan bahwa sejumlah unsur dari kode sosial, kita sesungguhnya bukan yang terbaik dan kita secara instingtif cenderung untuk menolak pendapat itu, maka kita harus berhenti. Selanjutnya kita harus lebih terbuka untuk menemukan kebenaran, apapun bentuknya. Pada akhirnya kitapun dapat memahami teori relativisme kultural, meskipun teori ini mempunyai kelemahan-kelemahan. Relativisme kultural merupakan teori yang menarik, karena didasarkan pada pandangan yang sejati, bahwa banyak praktik dan sikap yang dianggap begitu wajar ternyata hanya hasil dari sebuah kultural.

DAFTAR RUJUKAN

- Barnadib, I. 1987. *Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Yogyakarta.
- Benedict, R. 1946. *Patterns of Culture*. New York: Pelican.
- Brameld, T. 1958, *Philosophies of Education in Cultural Perspective*. New York: The Dryden Press.
- Dewey, J. 1946. *Democracy and Education*. New York: The Macmillan Company.
- Harman, G., dan Thomson, J. 1996. *Moral Relativism and Moral Obyective*. Oxford: Blackwell.
- Langeveld, M. J. 1955. *Beknopte Theoretische Paedagogiek*. New York: JB Wolters.
- Meiland, J. W., dan Michael, K. 1982. *Relativism: Cognitive and Moral*. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
- Nagel, T. 1997. *The Last World*. New York: Oxford University Press.
- Pudjawijatna. 1958. *Pembimbing ke Arah Alam Filsafat*. Jakarta: PT. Pembangunan.
- Rachels, J. 2004. *Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.